

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Penduduk yang produktif apabila terserap secara optimal dalam pasar tenaga kerja dapat memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penyediaan lapangan kerja yang memadai, terutama karena laju pertumbuhan angkatan kerja cenderung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia.

Tahir menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikator krusial untuk melihat sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Oleh sebab itu, dinamika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi isu strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya ketika dikaitkan dengan aspek gender yang menunjukkan perbedaan pola partisipasi antara laki-laki dan perempuan .

Isu ketidaksetaraan gender dalam ketenagakerjaan merupakan fenomena global yang hingga kini masih menjadi perhatian berbagai negara, termasuk Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan. Kesenjangan gender dalam pasar

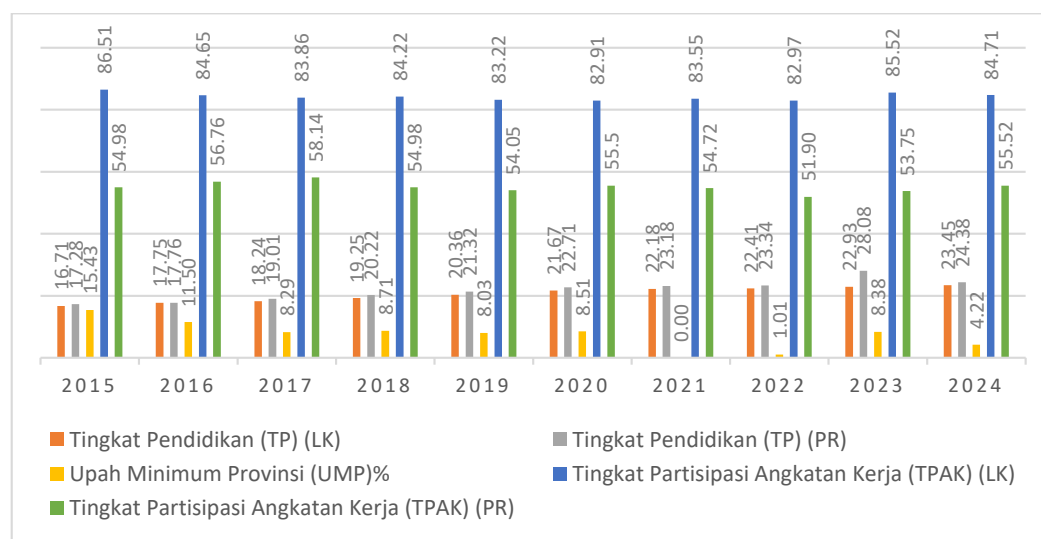
tenaga kerja terlihat dari perbedaan peran sosial, akses terhadap pendidikan, peluang kerja, serta tingkat upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Gender dalam kajian sosial dipahami sebagai konstruksi budaya yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan (Anik Iftitah dkk., 2023).

Meskipun konsep gender bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial dan perkembangan pengetahuan, realitas menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam memasuki pasar kerja. Fenomena tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki, meskipun capaian pendidikan perempuan di sejumlah wilayah termasuk Kalimantan Selatan, cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Mulia, 2015). Dengan demikian, isu ketimpangan gender dalam TPAK merupakan fenomena umum yang relevan dan mendesak untuk dikaji secara lebih mendalam.

Fenomena tersebut diperkuat oleh berbagai data empiris (Gambar 1.1) yang menunjukkan bahwa kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di Kalimantan Selatan masih cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa laki-laki secara konsisten memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam periode 2015–2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Sementara itu, capaian pendidikan yang terus meningkat pada kedua gender ternyata tidak serta-merta mampu menutup jarak partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Selain faktor pendidikan, upah minimum provinsi juga menjadi variabel penting dalam memengaruhi keputusan individu untuk memasuki pasar kerja.

Namun, data menunjukkan bahwa kenaikan upah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan justru lebih sensitif terhadap perubahan biaya peluang antara pekerjaan domestik dan pekerjaan berupah sehingga kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak selalu memberikan dampak positif bagi peningkatan partisipasi mereka (Nabila & Nugraha, 2025). Hal ini sejalan dengan laporan ILO (*International Labour Organization*) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berdasarkan jenis kelamin tetap menjadi isu persisten, di mana rata-rata upah perempuan berada jauh di bawah laki-laki (ILO, 2017). Fakta ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pasar kerja bukan sekadar fenomena normatif, tetapi benar-benar terjadi secara empiris dan terukur.

Berikut adalah data Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki dan Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2015-2024 (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1.1 Grafik Data Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan menurut gender, terlihat bahwa pendidikan laki-laki mengalami kenaikan setiap tahun selama 2015–2024. Kenaikan tersebut tercatat sebesar 1,04% pada 2016, 0,49% pada 2017, 1,01% pada 2018, 1,11% pada 2019, 1,31% pada 2020, 0,51% pada 2021, 0,23% pada 2022, 0,52% pada 2023, dan 0,52% pada 2024. Sementara itu, pendidikan perempuan juga menunjukkan tren meningkat, yaitu 0,49% pada 2016, 1,24% pada 2017, 1,21% pada 2018, 1,10% pada 2019, 1,39% pada 2020, 0,47% pada 2021, 0,16% pada 2022, dan 4,73% pada 2023, meskipun pada 2024 terjadi penurunan sebesar 3,69%.

Untuk variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), Gambar 1.1 menunjukkan perubahan yang fluktuatif sepanjang 2015–2024. Penurunan terjadi pada 2016 sebesar 3,93%, 2017 sebesar 3,21%, 2019 sebesar 0,68%, 2021 sebesar 8,51% sebagai dampak pandemi, dan 2024 sebesar 4,16%. Di sisi lain, UMP meningkat pada 2018 sebesar 0,42%, 2020 sebesar 0,48%, 2022 sebesar 1,01%, dan 2023 sebesar 7,37%.

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), berdasarkan Gambar 1.1, TPAK laki-laki juga mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada 2016 sebesar 1,86%, 2017 sebesar 0,79%, 2019 sebesar 1%, 2020 sebesar 0,31%, 2022 sebesar 0,58%, dan 2024 sebesar 0,81%. Kenaikan tercatat pada 2018 sebesar 0,36%, 2021 sebesar 0,64%, dan 2023 sebesar 2,55%.

Sementara itu, TPAK perempuan menunjukkan pola yang berbeda, dengan kenaikan pada 2016 sebesar 1,78%, 2017 sebesar 1,38%, 2020 sebesar 1,45%, 2023

sebesar 1,85%, dan 2024 sebesar 1,77%. Penurunan terjadi pada 2018 sebesar 3,16%, 2019 sebesar 0,93%, 2021 sebesar 0,78%, dan 2022 sebesar 2,82%.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 memperdalam ketimpangan tersebut. BPS mencatat bahwa perempuan mengalami penurunan partisipasi kerja yang lebih tajam dibandingkan laki-laki, terutama karena beban domestik yang meningkat selama masa pandemi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami kehilangan pekerjaan dan penurunan jam kerja dibandingkan laki-laki. Selain itu, struktur sosial di banyak daerah termasuk Kalimantan Selatan, masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih dituntut untuk menjalankan peran domestik.

Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan memilih tidak bekerja meskipun secara pendidikan mereka memiliki kapabilitas yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada laki-laki pada kelompok usia tertentu. Dengan demikian, data empiris secara kuat menunjukkan adanya ketimpangan nyata dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan gender dan pentingnya mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi fenomena ini.

Setelah melihat data empiris tersebut, penting untuk menelaah adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan realitas di lapangan. Secara ideal, peningkatan kualitas pendidikan dan penetapan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja, baik pada laki-laki maupun perempuan. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan penghasilan (Sholeh, 2012). Sejalan dengan itu, di Waktu

Luang-Kerja menyatakan bahwa kenaikan upah akan meningkatkan insentif bagi individu untuk bekerja dibandingkan mengalokasikan waktu untuk aktivitas non-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, idealnya pendidikan dan upah minimum berperan sebagai pendorong utama masuknya penduduk usia kerja ke pasar tenaga kerja.

Namun, realitas menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara teori dan kondisi faktual di Kalimantan Selatan, peningkatan UMP tidak selalu meningkatkan TPAK, terutama pada kelompok perempuan. Sementara itu, peningkatan tingkat pendidikan tidak sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan, terutama karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi serta adanya hambatan sosial-budaya. Selain itu, pasar tenaga kerja di wilayah ini masih didominasi oleh sektor pertambangan, perkebunan, dan industri berbasis komoditas yang umumnya lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Hal ini memperkuat ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang dijelaskan oleh teori dan realitas empiris di daerah tersebut. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih tepat bagaimana variabel pendidikan dan UMP memengaruhi TPAK berdasarkan gender secara lebih spesifik.

Beberapa penelitian terdahulu juga menjadi salah satu alasan penting mengapa penelitian ini relevan untuk dilakukan. Menurut Nurul Fuada dan Syamsul Amar yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Jenis Kelamin Terhadap TPAK di Sumatera Barat” menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap TPAK, menyimpulkan

bahwa pendidikan merupakan faktor kunci yang meningkatkan partisipasi angkatan kerja (Fuada & Amar, 2024). Menurut Kadek Borgan Bonneri yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manadojustu” menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK di Kota Manado (Bonneri dkk., 2018). Hasil yang bertolak belakang ini menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap TPAK bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi, begitu pula dengan variabel upah minimum.

Adapun menurut Cahyanda Novita dan Marwan yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat” membuktikan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Nofrita & Marwan, 2022). Sedangkan, menurut Astina yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone” menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap TPAK di Kabupaten Bone (Astina, 2021). Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten ini menegaskan perlunya penelitian lanjutan yang mempertimbangkan konteks regional dan karakteristik gender secara lebih spesifik.

Selain itu, pemilihan variabel tingkat pendidikan dan Upah Minimum Provinsi dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris. Secara teoritis, pendidikan merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dijelaskan dalam Teori Modal Manusia, sehingga semestinya berpengaruh terhadap keputusan individu untuk bekerja.

Namun, data empiris menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan, khususnya pada perempuan, tidak selalu diikuti peningkatan partisipasi angkatan kerja, sehingga penting untuk menguji kembali efektivitas pendidikan dalam konteks gender di Kalimantan Selatan. Demikian pula, UMP merupakan instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang secara teoritis meningkatkan insentif bekerja, tetapi tren data menunjukkan respons yang tidak konsisten antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksesuaian antara teori dan realitas tersebut, ditambah dengan temuan penelitian terdahulu yang saling bertentangan, memperkuat urgensi menjadikan tingkat pendidikan dan upah minimum provinsi sebagai variabel utama dalam penelitian ini.

Dari sisi akademik, penelitian ini sangat penting karena mampu mengisi kekosongan literatur mengenai dinamika TPAK berbasis gender di Kalimantan Selatan dengan rentang waktu 2015–2024. Kebanyakan penelitian terdahulu fokus pada wilayah lain atau hanya melihat variabel-variabel tersebut secara agregat tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan pendekatan variabel dummy gender, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis baru sekaligus memperkuat pemahaman mengenai bagaimana pendidikan dan upah minimum memengaruhi keputusan bekerja pada kelompok yang berbeda.

Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan sensitif gender. Temuan penelitian dapat membantu pemerintah merancang kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, memberikan akses pelatihan



kerja yang lebih luas kepada perempuan, dan meninjau kembali kebijakan upah minimum agar lebih sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan keseluruhan permasalahan tersebut, jelas bahwa kesenjangan gender dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan isu yang sangat penting untuk diteliti. Fenomena umum menunjukkan bahwa partisipasi kerja perempuan masih tertinggal jauh dibandingkan laki-laki. Data empiris memperkuat bahwa masalah ini nyata dan berkelanjutan. Ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan realitas menunjukkan adanya hambatan struktural yang belum terpecahkan. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum terisi, terutama dalam konteks regional Kalimantan Selatan. Urgensi akademik dan praktis semakin menegaskan bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap TPAK berdasarkan gender.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi dasar kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif dan berkeadilan gender di Provinsi Kalimantan Selatan, yang ditulis dalam skripsi berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Gender di Kalimantan Selatan Periode 2015-2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Apakah Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu:

1. Untuk menganalisis Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Untuk menganalisis Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Untuk menganalisis Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan?

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat bagi beberapa pihak terutama hal teoritis, praktis dan akademis.

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan literatur yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
- b. Menambah dan memperkaya referensi akademik dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan terkait pendidikan, upah minimum provinsi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
- b. Memberikan masukan dalam upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja serta kesetaraan gender, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

##### **3. Secara Akademis**

- a. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.
- b. Memberikan gambaran untuk pengembangan dan penyempurnaan model penelitian pada penelitian berikutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan bab yang menyajikan pendahuluan yang berisikan bagian latar belakang masalah, kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah serta disusun tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik secara teoritis, praktis maupun akademis. Kemudian, sistematika penulisan menjelaskan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan beberapa teori dari variabel yang diteliti, serta kajian pustaka terdahulu yang disajikan sebagai referensi dari berbagai aspek yang relevan dengan topik yang diteliti. Kerangka Pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian dugaan sementara yang belum pasti dan harus dinyatakan secara spesifik agar bisa diuji secara ilmiah

Bab III berisikan pembahasan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian, lokasi penelitian dilakukan, subjek dan objek yang ada pada penelitian, data dan sumber data yang didapatkan, metode pengumpulan data pada penelitian ini, serta teknik analisis data dijelaskan secara rinci pada bab ini.

Bab IV merupakan bab yang menyajikan hasil penelitian dan analisis data. Data yang diperoleh dari proses penelitian disajikan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara mendalam dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran sebagai rekomendasi yang didasarkan pada temuan penelitian dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait serta penelitian selanjutnya.